

***SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS AND CULTURAL COMMUNITIES
AROUND THE AREA PT. MAHAKARYA PERDANA GEMILANG IN THE
DISTRICT PROVINCE KUTAI KARTANEGARA EAST KALIMANTAN***

Warman

(Lecturer Department of FKIP IPS-Unmul)

ABSTRACT

Plans for utilization of timber in plantations covering 30,454 ha by PT. Mahakarya Perdana Gemilang in Kutai regency of East Kalimantan province besides a positive impact also negatively impact the socio-economic and cultural conditions of the surrounding community. The survey results revealed that the average household income per capita per year is good enough or are not classified as poor. Besides As with farmers, civil servants and employees of the company, they also have side jobs such as working as a builder, selling groceries and fishing. Land area in controlled an average of 2 hectares per household obtained from parental inheritance, opening the forest itself, and some who do not own land, because they even have a family as head of the family, but they still ride in the elderly. The type and non-formal economic activity in general is quite varied, such as shops, kiosks groceries, cooperatives, coffee shops, and lodging. Economic infrastructure is sufficient.

Applicable customs are tribal Kutai and Dayak tribes. The role of traditional leaders is dominant in resolving issues related to customary law. The things that a ban has been arranged with the council, for example, prohibited liquor, intimate relationships before marriage. Social conflicts are rare, and the source of the cause of young people is a problem and can be solved by way of deliberation / familiarity. The process of assimilation has occurred between them. Social institutions and functioning properly include RT, Institute of Traditional, village councils, and religious institutions. People's perception of the business plan on the utilization of timber plantations by PT. Mahakarya Perdana Gemilang very positive. People consider that the presence of PT. Mahakarya Perdana Gemilang will benefit them.

Keywords: Socioeconomic; Social Culture.

Warman is Lecturer FKIP Univ. Mulawarman Samarinda.

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Otonomi Daerah 1999).

Hutan produksi di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dimanfaatkan secara arif, dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup untuk kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang.

PT. Mahakarya Perdana Gemilang adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan industri pengolahan hasil-hasilnya berminat mengusahakan hutan tanaman di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Dengan didorong komitmen, kemampuan manajerial dan investasi PT. Mahakarya Perdana Gemilang mengajukan permohonan areal kerja IUPHHK-HTI yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Kelompok Hutan Sungai Belayan, seluas ± 30.454 Ha. Berdasarkan Peta Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts-11/2001 tanggal 15 Maret 2001 (Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur), lokasi areal tersebut merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan dengan fungsi hutan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 29.023 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 1.431 Ha.

Tujuan dari kegiatan UPHHK-HTI PT. Mahakarya Perdana Gemilang adalah untuk menghasilkan kayu dalam kuantitas dan kualitas yang memadai secara terus menerus, sebagai bahan baku industri, dan diharapkan bermanfaat untuk pengembangan masyarakat (*community development*) di sekitar proyek melalui program Pengembangan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), serta terbukanya kesempatan atau lapangan kerja baru.

Tetapi rencana kegiatan tersebut selain berdampak positif, diperkirakan juga akan menimbulkan dampak negative terhadap komponen lingkungan hidup di sekitarnya, yakni: komponen fisik-kimia, biologi, social ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa dampak negatif dari suatu proyek yang direncanakan harus diminimasi sekecil mungkin, agar kegiatan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan kualitas lingkungan hidup di sekitar proyek yang direncanakan tidak menurun.

Untuk meminimasi dampak negative tersebut perlu dilakukan studi dengan tujuan : (1) mendapatkan data aktual tentang kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, (2) memperoleh gambaran tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat dan (3) untuk mencoba menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan rencana kegiatan guna mengelola kemungkinan timbulnya dampak.

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah setempat dan pihak pemrakarsa, guna meminimasi dampak negatif yang diakibatkan kegiatan proyek.

II. METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan, yaitu kepala desa, tokoh agama, ketua RT, pemuka adat, dan aparat pemerintah yang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak pemrakarsa dan instansi-instansi lain yang terkait seperti Dinas Kehutanan, Bappeda, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa di wilayah studi.

Komponen sosial ekonomi yang diteliti meliputi : (1) ekonomi rumah tangga, yang mencakup tingkat pendapatan dan pola nafkah ganda, (2) ekonomi sumberdaya alam, meliputi: pola pemilikan dan penguasaan lahan, pola penggunaan lahan, dan nilai lahan, (3) perekonomian lokal dan regional, meliputi: penyerapan tenaga kerja, jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta aksesibilitas wilayah. Sedangkan komponen sosial budaya meliputi : (1) adat istiadat dan nilai budaya, (2) proses/interaksi sosial, (3) pranata social/kelembagaan masyarakat, (4) persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana kegiatan.

Selain data sekunder, data primer diperoleh melalui survai sampel/wawancara dengan responden sebanyak 10% dari jumlah kepala keluarga yang ditetapkan berdasarkan strata yang ada pada masing-masing desa yang diperkirakan akan mendapatkan dampak negatif maupun dampak positif dari proyek.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sosial ekonomi untuk tingkat pendapatan ditabulasikan dan dianalisis dengan rumus sebagai berikut :

1) Tingkat Pendapatan

- (a) Tingkat pendapatan sebagai salah satu indikator ekonomi rumah-tangga dianalisis dari sisi penerimaan :

$$I = TR \quad \dots 1)$$

Keterangan :

I = Pendapatan (*Income*)

TR = Total penerimaan (*Total Revenue*)

- (b) Tingkat pendapatan sebagai salah satu indikator ekonomi rumah-tangga dianalisis dari sisi pengeluaran :

$$I = c - i + s \quad \dots 2)$$

Keterangan :

- I = Pendapatan (*income*)
 c = Konsumsi (*consumption*)
 i = Investasi (*investment*)
 s = Tabungan (*saving*)

2) Rata-rata Pendapatan /Pendapatan perkapita (Y)

$$Y = \frac{Y}{A} \quad \dots 3)$$

Keterangan :

- Y = Total pendapatan
 A = Jumlah tanggungan keluarga

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi

1. Ekonomi rumah tangga

Pendapatan per kapita penduduk merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan yang mendekati kebenaran, maka dilakukan pendekatan pengeluaran yang justru lebih akurat. Karena pada kenyataan di lapangan banyak responden yang tidak dapat mengungkapkan dengan benar tingkat pendapatannya.

Rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di wilayah studi disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan Penduduk Per-Rumah Tangga/ Bulan di Wilayah Studi (Berdasarkan Jawaban Responden 2012)

Desa	Rata-Rata Pendapatan Sesuai Desa (Rp)				Rata-rata jumlah jiwa/KK
	Pendapatan Minimum Perbulan	Pendapatan Maksimum Perbulan	Rata-rata Pendapatan Perbulan	Rata-rata Pendapatan Perkapita Pertahun	
Klekat	1.000.000	4.500.000	2.160.000	8.968.888,00	5.5
Long Beleh Haloq	1.000.000	3.000.000	1.982.000	5.447.314,30	4.36
Long Beleh Modang	1.000.000	3.000.000	1.997.500	5.544.142,90	4.35
Muai	1.300.000	7.500.000	3.100.000	9.199.571,43	4.2
Gunung Sari	1.300.000	3.300.000	2.193.333	6.969.333,33	3.93
Rata-rata Pendapatan di Wilayah Studi	1.120.000	4.260.000	2.286.566.6	7.225.849.99	4.47

Sumber : Data Primer, 2012

Pada level ekonomi rumah tangga berdasarkan data hasil survei sampel dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan rumah tangga di wilayah studi berkisar antara Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 7.500.000,00 per rumah tangga per bulan, dengan rata-rata tingkat pendapatan per bulan/rumah-tangga dilihat dari sisi pengeluaran adalah Rp. 2.286.566.6 atau Rp. 7.225.849.99/kapita/tahun, dengan jumlah jiwa rata-rata 4 orang per rumah tangga. Dengan asumsi bahwa harga beras di wilayah studi sebesar Rp. 10.000,- per kg, maka pendapatan tersebut setara dengan 722,58 kg beras per kapita per tahun. Berdasarkan kriteria Sayogyo (1977), pendapatan ini berada di atas garis kemiskinan, karena masih di atas 320 kg per kapita per tahun. Artinya, untuk level ekonomi rumah tangga, secara umum penduduk di wilayah studi pada tahun 2012 tidak tergolong miskin.

Mengenai pola nafkah ganda, penduduk Desa Klekat pada umumnya selain mengandalkan pada sumber pendapatan dari hasil pertanian, PNS dan karyawan perusahaan, mereka juga memiliki sumber pendapatan lain seperti bekerja sebagai tukang bangunan, jualan sembako dan bekerja sampingan sebagai nelayan. Demikian juga penduduk di desa lainnya (Long Beleh Haloq, Long Beleh Modang, penduduk Desa Muai, dan penduduk Desa Gunung Sari) juga memiliki sumber pendapatan lain seperti bekerja sebagai tukang bangunan, jualan sembako dan bekerja sampingan sebagai nelayan.

2. Ekonomi sumberdaya alam

Pola kepemilikan lahan masyarakat didasarkan atas pengakuan kerabat dan anggota masyarakat Desa yang ada dan belum atas dasar bukti sertifikat atau surat-surat tanah yang sah. Namun demikian, hampir dipastikan bahwa batas-batas lahan masyarakat adalah akurat dan umumnya Kepala Adat serta Kepala Desa mengetahui keberadaan lahan masyarakat ini. Hal ini terjadi karena waktu pembukaan dan pengerjaan lahan, anggota kerabat dan masyarakat umumnya dilibatkan secara bergotong-royong. Kepemilikan lahan ini sifatnya banyak yang sudah turun temurun yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Pembukaan lahan baru hanya dilakukan apabila lahan warisan tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya pembukaan lahan baru adalah atas pengetahuan dari Kepala Adat atau Kepala Desa.

Sumberdaya alam yang sangat penting dan bernilai bagi penduduk adalah lahan, karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari lahan, yaitu sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan tersebut umumnya belum/tidak memiliki surat (sertifikat). Lahan untuk berladang maupun untuk tempat tinggal (rumah dan pekarangan) umumnya mereka kuasai melalui/dengan cara membuka hutan. Dalam batas-batas wilayah Desa, lahan umumnya dikuasai oleh penduduk

Desa setempat. Namun ladang mereka ada juga yang jaraknya relatif jauh dari Desa, mengingat mereka umumnya melakukan perladangan dengan sistem berpindah-pindah (rotasi), sehingga memerlukan lahan yang cukup luas, dan jauh dari Desa.

Data mengenai nilai lahan di wilayah studi sifatnya sangat kualitatif, karena data kuantitatif (nilai moneter) sulit didapat, mengingat tanah di wilayah studi sampai saat ini (saat dilakukan survei) belum pernah dijual-belikan (belum ada pasarnya). Namun secara sosial, tanah di wilayah studi sangat bernilai bagi masyarakat, mengingat sebagian besar penduduk di wilayah studi bermatapencaharian sebagai peladang berpindah yang memerlukan banyak tanah, sehingga hidup mereka sangat tergantung pada tanah.

3. Perekonomian lokal dan regional

Parameter perekonomian lokal dan regional meliputi penyerapan tenaga kerja, jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aksesibilitas wilayah.

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Dampak kehadiran suatu perusahaan, diharapkan salah satunya dapat mengurangi pengangguran dengan menarik tenaga kerja masyarakat lokal di daerah tersebut. Dari informasi yang terkumpul tergambar jumlah tenaga kerja yang akan terserap di PT. MAHAKARYA PERDANA GEMILANG, yaitu berjumlah 360 orang dengan kualifikasi Sarjana dan Diploma (D3) berjumlah 166 orang (46%) dan untuk kualifikasi SMA, SMP,SD, dan Tidak punya Ijazah sebanyak 194 orang (54%).

Untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang diinginkan maka dilakukan penerimaan dengan prioritas tenaga kerja lokal, terutama non skill. Hal ini menunjukkan keberadaan PT. MAHAKARYA PERDANA GEMILANG telah memberikan dampak positif pada masalah tenaga kerja daerah, yang dengan sendirinya untuk tahap operasional akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap dan ini akan membantu perkembangan ekonomi daerah.

b. Jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal

Jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal yang terdapat di wilayah studi sampai saat ini (saat survei dilakukan) pada umumnya sudah cukup bervariasi, seperti Toko, Kios sembako, Koperasi, Warung kopi, dan Penginapan.

Mengenai jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal di wilayah studi disajikan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. *Jenis dan Jumlah Aktivitas Ekonomi Non Formal Di Wilayah Studi.*

Desa	Toko	Kios Sembako	Koperasi	Warung Kopi	Penginapan
Klekat	-	14	2	-	-
Long Beleh Haloq	6	10	2	-	-
Long Beleh Modang	1	5	5	-	-
Muai	5	9	1	19	1
Gunung Sari	-	1	1	3	1

Sumber : Kecamatan Kembang Janggut Dalam Angka, 2011

Kecamatan Tabang Dalam Angka, 2011

Informasi Perangkat Desa Masing-masing di Wilayah Studi, 2012

c. Fasilitas umum dan fasilitas sosial

Mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah studi sudah cukup memadai, oleh karena itu dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu faktor pendukung tingginya mobilitas sosial. Berdasarkan hasil survey sampel tergambar bahwa prasarana perekonomian yang ada di wilayah studi pada umumnya selain menggunakan mobil dan sepeda motor sebagai sarana transportasi darat, mereka juga menggunakan perahu motor sebagai sarana transportasi sungai. Hal ini seiring dengan adanya fasilitas jalan darat yang cukup bagus sehingga memungkinkan penduduk untuk menggunakan sarana transportasi tersebut.

d. Aksesibilitas Wilayah.

Jalur transportasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa-Desa wilayah studi selain menggunakan sarana transportasi air, juga menggunakan sarana transportasi darat baik yang menghubungkan antara Desa yang satu dengan Desa lainnya. Untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten pada setiap Desa dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi air dan darat dengan jarak waktu tempuh dari Desa-Desa wilayah studi ke Kota Kabupaten relatif tergolong cepat karena dapat dilakukan setiap saat.

Kondisi Sosial Budaya

1. Adat-istiadat dan budaya

Adat istiadat yang berlaku di Desa sekitar wilayah studi adalah adat suku Kutai dan Dayak. Dalam hal kehidupan bermasyarakat peran tokoh adat cukup dominan dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan hukum adat, dimana masyarakat

setempat masih cukup menjunjung tinggi nilai adat yang diterapkan terutama dalam hal kegiatan: perkawinan, kematian, kesenian adat, dan yang berhubungan dengan masalah lahan .

Mengenai hukum adat masih tetap dipertahankan dan bagi mereka yang melanggar akan dikenakan denda adat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat Desa tetangga. Tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, sebelumnya telah diatur dalam keputusan Dewan adat.

Pengobatan tradisional (Belian) sudah jarang dilakukan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang mereka anut. Mengenai hal-hal yang merupakan larangan telah diatur bersama oleh dewan adat, dilarang keras minuman keras, pergaulan intim sebelum menikah.

Perubahan sosial terutama berkenaan dengan gaya hidup masyarakat terlihat cukup deras disebabkan arus informasi dan transportasi yang masuk ke daerah ini. Perubahan-perubahan tersebut termasuk pola perilaku dan gaya hidup, seperti cara berpakaian para kaum muda, cara-cara bermusyawarah, perubahan pola pikir warga masyarakat. Kontrol social atas perilaku masyarakat dalam hal hubungan social budaya dan kekeluargaan/kekerabatan dirasakan masih sangat kuat melalui nilai-nilai/norma hukum adat.

Disamping itu terdapat pula hal-hal yang dianggap tabu untuk dilakukan masyarakat seperti menebang pohon benggeris, bengkirai, yang sebenarnya juga mempunyai nilai ekologis dan ekonomis.

2. Proses/interaksi sosial

Salah satu indikator proses atau interaksi sosial yang ditelaah dalam penelitian ini adalah kerjasama antar warga masyarakat. Berdasarkan survei sampel diketahui bahwa pada umumnya masyarakat cukup terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai pihak meskipun terdapat perbedaan suku ataupun agama. Hal itu menunjukkan keadaan iklim sosial yang cukup baik.

Proses interaksi / kerjasama di daerah penelitian tergambar dari bentuk-bentuk gotong-royong yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dari hasil survei sampel diketahui bahwa kegiatan gotong-royong penduduk desa masih baik, terutama kegiatan gotong royong yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Kerjasama untuk kepentingan umum adalah gotong-royong untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan desa. Adapun kerjasama yang menyangkut kepentingan kelompok ataupun pribadi, misalnya terjadi dalam mencari nafkah dan kegiatan keagamaan. Kerjasama juga terjadi antara warga setempat dengan pihak lain/pihak luar, misalnya perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Kerjasama dilakukan tanpa melihat perbedaan etnis maupun agama. Motivasi yang mendasari kerjasama itu di samping alasan ekonomi adalah motivasi keagamaan dan motivasi ke daerahan.

Indikator lainnya dari proses/interaksi sosial yang dikaji adalah konflik sosial. Mengenai potensi konflik dalam kehidupan masyarakat di wilayah studi memang

ditemukan pilihan responden yang menyatakan kadang-kadang muncul konflik. Namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah/kekeluargaan. Adapun sumber konflik yang muncul adalah masalah lahan, salah paham, kecemburuan social, nilai budaya luar, minuman keras, dan hubungan muda-mudi.

Proses sosial antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan selama ini (pada saat dilakukan survei) berlangsung kurang kondusif. Faktor penyebabnya menurut masyarakat antara lain adalah masalah lahan, pencemaran limbah, polusi udara, dan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama. Solusinya, pada saat survei dilakukan masih belum ada titik temu.

Proses sosial yang lebih jauh dalam kehidupan bermasyarakat ditandai dengan adanya asimilasi. Di lokasi wilayah studi juga telah terjadi asimilasi antara lain melalui perkawinan antar suku yang telah lama menetap di daerah itu. Mengenai latar belakang yang mendasari terjadinya proses asimilasi pada umumnya adalah bahwa faktor agama, prilaku dan saling mencintai sangat dominan yang mewarnai pendapat responden, sementara faktor persamaan suku dan pekerjaan kurang menentukan dalam proses asimilasi di daerah penelitian pada umumnya.

3. Kelembagaan sosial

Pranata sosial ini meliputi kelembagaan bi dang ekonomi, pendidikan, agama, sosial kemasyarakatan, lembaga Desa, dan lembaga adat.

Secara administratif lembaga formal yang berperan di pedesaan adalah RT (Rukun Tetangga) dan Kepala Desa. Lembaga lain yang berperan di Desa adalah Badan Perwakilan Desa (BPK) yang mempunyai fungsi strategis untuk menangkap dan mengungkapkan aspirasi, sebagai bentuk demokratisasi di pedesaan. Lembaga ini selain berperan sebagai badan perencanaan di Desa juga berusaha menggalang dan meningkatkan kegiatan gotong-royong masyarakat di Desa.

Sedangkan kelembagaan pemuda yang ada dan berfungsi adalah Karang Taruna dan perkumpulan olah raga yang merupakan wadah kaum muda untuk berkreasi dan berorganisasi. Adapun lembaga-lembaga *social religius* lainnya seperti kelompok pengajian bagi yang beragama Islam dan kebaktian bagi yang beragama Katholik telah berkembang cukup baik.

4. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana kegiatan PT. MAHAKARYA PERDANA GEMILANG

Sebagian besar responden (67.37%) telah mengetahui keberadaan PT. Mahakarya Perdana Gemilang. Mereka mengaku mengetahuinya dari pihak perusahaan melalui sosialisasi. Sedangkan sebagian lainnya (32.63%) menyatakan belum tahu tentang keberadaan PT. Mahakarya Perdana Gemilang. Meskipun mereka menyatakan belum mengetahui tentang keberadaan PT. Mahakarya Perdana Gemilang, namun ketika ditanya tentang sikapnya terhadap rencana kegiatan tersebut pada umumnya (86.32%) menyatakan “setuju”, 12.63% responden “tidak ada

pendapat” dan “ragu-ragu”, dan hanya 1.05% responden yang menyatakan tidak setuju.

Harapan responden akan hadirnya perusahaan tergambar bahwa perusahaan akan menguntungkan dalam hal membantu pemerintah dan kontribusi pembangunan daerah, kemudian disusul dapat membuka peluang kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu berharap agar perusahaan memberikan bantuan di bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pertanian, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Adapun tanggapan beberapa responden yang menyatakan tidak setuju pada umumnya mereka menganggap kehadiran perusahaan akan menimbulkan kerusakan hutan, bencana banjir, dan kemungkinan akan meningkatkan potensi konflik.

Hasil survei sampel tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil diskusi bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa serta masyarakat, yang menggambarkan bahwa pada umumnya masyarakat mendukung dan mengharapkan agar rencana kegiatan pengelolaan hutan kayu oleh PT. Mahakarya Perdana Gemilang di wilayah Desa mereka tetap dilanjutkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rata-rata kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat cukup baik (tidak tergolong miskin). Pada umumnya penduduk selain mengandalkan pada sumber pendapatan dari pekerjaan pokok, mereka juga memiliki sumber pendapatan lain yang cukup bervariasi, seperti bekerja sebagai tukang bangunan, jualan sembako dan bekerja sampingan sebagai nelayan.
2. Rata-rata kepala keluarga memiliki lahan seluas antara 2 Ha sampai 8 Ha, status lahan pada umumnya tidak disertai surat bukti apapun. Nilai lahan di wilayah studi bersifat kualitatif, karena belum pernah dijual-belikan. Namun secara sosial, tanah di wilayah studi sangat bernilai bagi masyarakat, karena sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan berkebun, sehingga hidup mereka sangat tergantung pada tanah. Pola pemanfaatan sumberdaya alam adalah untuk mendirikan rumah, sebagai sarana transportasi dan sumber mencari nafkah.
3. Kegiatan perekonomian lokal yang terdapat di sekitar wilayah studi pada umumnya sudah cukup bervariasi, seperti seperti Toko, Kios sembako, Koperasi, Warung kopi, dan Penginapan. Prasarana perekonomian yang ada pada umumnya selain menggunakan mobil dan sepeda motor sebagai sarana transportasi darat, mereka juga menggunakan perahu motor sebagai sarana transportasi sungai. Untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten pada setiap Desa dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi air dan darat dengan jarak

waktu tempuh dari Desa-Desa wilayah studi ke Kota Kabupaten relatif tergolong cepat karena dapat dilakukan setiap saat.

4. Adat istiadat yang berlaku di Desa wilayah studi adalah adat suku Kutai dan Dayak. Dalam hal kehidupan bermasyarakat peran tokoh adat cukup dominan dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan hukum adat, dimana masyarakat setempat masih cukup menjunjung tinggi nilai adat yang diterapkan terutama dalam hal kegiatan: perkawinan, kematian, kesenian adat, dan yang berhubungan dengan masalah lahan.
5. Walaupun penduduk di lokasi penelitian sebagian berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa dan agama yang berbeda, namun jarang terjadi perselisihan antar warga yang mengarah kepada unsur sara. Proses asimilasi telah terjadi diantara mereka, antara lain melalui pernikahan antar suku.
6. Lembaga-lembaga sosial yang ada di lokasi penelitian disamping Desa antara lain adalah Rukun Tetangga (RT), Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa, Pertahanan Sipil (Hansip), Karang Taruna, Koperasi Unit Desa, Perkumpulan olah raga, PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan lembaga keagamaan.
7. Persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan PT. Mahakarya Perdana Gemilang adalah sangat positif. Masyarakat menilai bahwa kehadiran perusahaan tersebut akan memberikan manfaat bagi mereka. Mereka berharap agar kegiatan pengelolaan hutan kayu oleh PT. Mahakarya Perdana Gemilang segera terealisasi. Beberapa harapan dari masyarakat yang muncul antara lain agar perusahaan memberikan bantuan di bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pertanian, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.

Saran-saran

1. Rencana kegiatan IUPHHK-HTI oleh PT. Mahakarya Perdana Gemilang di Kabupaten Kutai Kertanegara, selain berdampak positif juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitarnya termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Untuk itu dalam penanganan dampak akan lebih tepat bila dilakukan terhadap sumber-sumber penyebab timbulnya dampak, seperti pada saat kegiatan sosialisasi publik, rekrutman tenaga kerja, dan tingkah laku karyawan/buruh pendatang.
2. Kegiatan ijin koridor lahan untuk PT. Mahakarya Perdana Gemilang seluas 30.454 Ha diperkirakan akan menimbulkan dampak negative, yakni semakin berkurangnya luasan lahan dan berkurangnya keragaman sumber matapencarian masyarakat. Agar taraf hidup masyarakat sekitar tetap terjaga dan bahkan meningkat, maka perlu dilakukan bimbingan teknis budidaya berbagai jenis tanaman, perikanan, peternakan dan industri rumah tangga sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam proses penerimaan karyawan/buruh, hendaknya lebih memprioritaskan pada masyarakat setempat selama memenuhi spesifikasi keahlian yang dipersyaratkan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

4. Perlu adanya pembinaan terhadap karyawan/buruh terutama pendatang, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan adat budaya masyarakat setempat sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan/norma yang berlaku di masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
5. Pengusaha perlu menumbuhkan peran serta masyarakat pada kegiatan perdagangan, jasa angkutan, dan memberikan bantuan sosial, serta menindak tegas terhadap karyawan/buruh yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anonim. 2000. *Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman*. Komdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Anonim. 2012. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup*.
- Anonim. 1996. *Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep-229/11/1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL*.
- Poedjawijatna, 1987. *Manusia dengan Alamnya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sajogyo 1982. *Bunga Rampai Perekonomiaan Desa*. Yayasan Agro-ekonomi, IPB, Bogor.
- Sajogyo 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LPSP-IPB, Bogor.
- Sajogyo 1989. *Sosiologi Pedesaan*. Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Soemarwoto, O. 1989. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. UGM-Press, Yogyakarta.
- Tjitrajaya, I & A.P. Vayda. 1990. *Mangkaji Hubungan Timbal Balik antara Prilaku Manusia dan Lingkungan*. LIPI, Jakarta.

Wirosuhardjo, K. 1991. *Dasar-Dasar Demografi*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.